



“SERBA AUTOPOIESIS” PUDARNYA PERAN MEDIA MASSA DALAM PANDANGAN TEORI SISTEM NIKLAS LUHMANN

Noveri Faikar Urfan

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis dan Humaniora,

Universitas Teknologi Yogyakarta

Abstrak

Fokus studi ini adalah pada masalah sistemik orientasi media massa ditinjau dari teori sistem Niklas Luhmann. Luhmann berpandangan bahwa sistem media massa mempunyai karakteristik yang autopoiesis. Sistem autopoiesis ini mengandaikan bahwa suatu sistem memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kodenya sendiri untuk menghindari kompleksitasnya terhadap faktor eksternal, yaitu lingkungan. Kemampuan ini membuat media massa cenderung mengabaikan faktor terpenting dalam demokrasi, yaitu bagaimana media massa mampu berperan dalam wacana kesejahteraan. Tulisan Luhmann sebenarnya berangkat dari kritiknya terhadap ahli teori sistem Talcott Parsons. Parsons melihat sistem dalam konteks keharusannya untuk memiliki tujuan dalam menjaga keseimbangan. Namun, Luhmann justru melihat sistem bergerak tanpa keseimbangan, karena sistem berjalan dengan kodenya masing-masing. Pandangan Niklass Luhmann yang menjelaskan ciri-ciri sistem autopoiesis juga menuai kritik. Kritik terutama datang dari punggawa madzhab Frankfurt, Jurgen Habermas. Habermas menganggap bahwa teori harus menyumbangkan jalan untuk membebaskan (emansipasi) masyarakat dari masalah yang dihadapinya, tidak seperti Luhmann yang hanya menjelaskan masalah. Pada bagian kesimpulan dan diskusi, tulisan ini menawarkan sebuah alternatif, bahwa media harus dilihat posisinya yang penting dalam demokrasi, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan demokrasi dengan mempromosikan media publik.

Kata Kunci: Media Massa, Autopoiesis, Niklass Luhmann, Media Publik.

PENDAHULUAN

Pasca runtunya rezim diktator di berbagai belahan dunia, demokrasi dianggap sebagai sistem politik paling paripurna, karena hanya dengan sistem politik demokrasi, resiko atas lahirnya pemerintahan diktator yang membawa kerusakan dapat dibendung (Suseno, 2008). Sebab itu, banyak negara disibukkan dalam perjuangan mengambil kembali hak politik dari rezim otoriter menuju kedaulatan politik yang tidak terpusat, mengakui kesetaraan hak dalam bersuara dan pada intinya mengembalikan konsep kedaulatan pada rakyat. Perjuangan inipun dilakukan dengan cara yang berdarah-darah dan memakan banyak korban jiwa.

Kemudian, mengapa sistem demokrasi layak diperjuangkan? Sebab dalam sistem demokrasi, visi tentang kedaulatan rakyat atas negara akan diakui secara penuh. Seperti yang diungkapkan oleh presiden ke 16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln tentang demokrasi yaitu sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan rakyat (Syahputra, 2013). Sementara Robert A Dahl dalam karyanya yang penting, berjudul *On Democracy*, menyebut bahwa demokrasi mempunyai beberapa kriteria penting yaitu :

Demokrasi menyediakan peluang untuk: partisipasi efektif; kesetaraan dalam pemilihan umum; meningkatkan pemahaman yang tercerahkan; kontrol penuh atas agenda dan inklusi bagi orang dewasa (Dahl, 1998).

Ibarat dua sisi mata uang, demokrasi memang menyajikan harapan di satu sisi, seperti pengakuan partisipasi warganegara untuk memilih pemimpin yang akan menentukan kebijakan, pers bebas, pluralisme, dan perlihndungan HAM. Harapan-harapan inilah yang memagari kebimbangan orang atas

penting dan perlunya demokrasi. Namun, demokrasi juga mengandung berbagai persoalan di sisi yang lain. Beberapa persoalan tersebut seperti gagalnya demokrasi dalam menyediakan kesejahteraan dan terjebak dalam demokrasi elektoral-prosedural yang sempit.

Sementara itu, media massa mempunyai peran signifikan dalam demokrasi, dengan cirinya sebagai kontrol sosial dan memunculkan wacana terkait problem-problem kehidupan demokrasi. Tulisan ini bermaksud untuk mendiskusikan problem demokrasi dalam kaitannya dengan media masa. Ada kecenderungan media massa di Indonesia terlalu mewacanakan demokrasi dalam perspektif libertarian, sehingga kehilangan wacana terkait antagonisme dan oposisi, padahal dua hal ini penting dalam tradisi demokrasi yang demokratik. Karena wacana dalam media massa cenderung libertarian, maka problem penciptaan kesejahteraan menghilang dalam wacana. Tulisan ini berusaha mengaitkan pudarnya peran media massa dalam sistem demokrasi, karena sifatnya yang autopoiesis (*autopoietic*).

Sifat sistem autopoiesis sendiri berasal dari pemikiran Niklas Luhmann, yang berargumen bahwa sebuah sistem dapat memproduksi dan memelihara diri sendiri. Ini yang pada akhirnya menjadikan media massa sebagai entitas yang tidak terkendali dan kurang mendukung sistem demokrasi. Pemikiran Niklas Luhmann sebenarnya adalah kritik pada teori sistem Talcott Parsons, di mana Parsons melihat bahwa sistem memiliki tujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan. Luhmann sendiri juga mendapat kritikan karena dianggap tidak menyediakan solusi dan hanya menyingkap problemnya saja. Untuk itu, pada bagian diskusi nantinya, akan disajikan tawaran terkait pemanfaatan media publik di tengah kondisi sistem yang serba autopoiesis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan poin-poin penting dalam kajian tentang teori autopoiesis Niklass Luhmann dan pemanfaatan media publik sebagai tawaran alternatif solusi di tengah kondisi ekosistem media yang serba autopoiesis. Studi kepustakaan sendiri menurut Mestika Zed, dalam bukunya Metode Penelitian Kepustakaan, merupakan sebuah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung argumen yang diajukan oleh peneliti (Zed, 2004). Untuk itu, sumber data dari penelitian ini secara umum adalah sumber sekunder yang diperoleh dari telaah buku-buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dalam Pandangan Talcott Parsons dan Nicklas Luhmann

Dalam pandangan teori sistem Talcott Parsons, sistem negara harus mempunyai tujuan bersama. Tujuan itu yang harusnya didukung oleh seluruh fungsi di setiap elemen dalam sistem bernegara. Karena itulah, Parsons sering disebut sebagai tokoh aliran fungsionalisme struktural, karena menekankan pentingnya fungsi dalam sistem. Parsons kemudian mengetengahkan skema AGIL. Bahwa jika sebuah negara ingin bertahan, ia harus menjalankan tujuan (*goal attainment*), mampu beradaptasi (*adaptation*), elemen-elemen dalam sistem harus terintegrasi (*integration*), dan menjaga pola untuk memelihara stabilitas (*latency*) (Ritzer, 2015). Begitupun dengan media massa, ia harus mempunyai tujuan yang jelas dan tidak boleh berseberangan dengan tujuan negara, mampu beradaptasi dengan situasi, dan tidak enggan untuk diintegrasikan bersama sub-sub sistem

yang lain, dan ia harus ikut menjaga stabilitas.

Skema AGIL yang dijelaskan Parsons memang tampak ideal. Meskipun dalam realitanya, fungsi-fungsi tersebut sering tidak bekerja dengan semestinya. Problem itu disebabkan karena pada hakikatnya sistem-sistem cenderung berkehendak untuk menentukan jalannya sendiri. Hal ini yang menjadi celah dari analisis Parsons, bahwa sistem cenderung sulit untuk dikontrol dan memiliki kemauan untuk menciptakan aturan mainnya sendiri (*self-creation*). Kondisi ini yang membuat teoretisi sistem Niklas Luhmann, melayangkan kritiknya atas teori sistem Talcot Parsons. Luhmann menganggap bahwa dalam masyarakat modern, sistem selalu memiliki berbagai kemungkinan, dan dalam realita kinerjanya bisa jadi berbeda jauh dari tujuan idealnya (*contingency*), keadaan ini disebabkan karena sistem memiliki kemampuan untuk merujuk pada diri sendiri (*self-reference*) (Luhmann, 2000).

Konsep AGIL yang dijelaskan Parsons agaknya cocok jika diterapkan untuk menganalisis keadaan di mana terdapat kekuasaan yang mengontrol secara kuat, yang sedapat mungkin mampu memelihara dan mengendalikan jalannya sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, keadaan ini pernah terjadi di masa Orde Baru, saat itu kekuasaan yang terpusat dapat mengendalikan dan mengontrol jalannya sistem-sistem untuk menjalankan program negara. Dalam konteks ini, Parsons menilai bahwa kekuasaan mempunyai sisi positif untuk menjaga rencana-rencana bersama agar dapat terlaksana tanpa ada gangguan. Seperti yang dijelaskan oleh Parsons berikut ini :

Kekuasaan adalah kapasitas umum untuk mengamankan kinerja kewajiban yang mengikat pada unit-unit dalam sistem organisasi kolektif, ketika kewajiban dilegitimasi dengan mengacu pada tujuan kolektif, dan di mana terjadi

pembangkangan ada penegakan oleh sanksi situasional negatif apapun lembaga penegaknya. Parsons dalam Budiarto (Budiarto, 2008).

Pemikiran yang diungkapkan oleh Parsons tampak ideal, ketika pada era otoritarianisme Orde Baru, dominasi pemerintah dalam mengontrol masyarakat masih begitu kuat dan mengakar, bahkan mereka menggunakan apparatus represif (militer) untuk menakut-nakuti warga negara. Karena Orde Baru menganggap, setiap bagian dalam sistem harusnya berjalan senada dengan tujuan negara dan diperlukan kontrol kuat untuk menjaganya. Jika terdapat resistensi di dalam sistem, maka sanksi bisa diambil sebagai wujud pengelolaan terhadap sistem tersebut. Negara yang menganut sistem seperti ini cenderung memakasakan kehendaknya, sebab penguasa mempunyai segala instrumen untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan.

Namun, tipe sistem seperti ini cenderung beresiko dan meningkatkan peluang pengekangan hak-hak paling mendasar dari masyarakat, misalkan terkait dengan pelanggaran HAM dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dihalalkan asalkan sesuai dengan keinginan penguasa. Untuk itulah, sebenarnya Indonesia telah berusaha untuk lepas dari rezim otoriter yang bercokol selama 32 tahun yang dimotori oleh peristiwa reformasi 1998, dan menuju negara demokratis yang ditegaskan dengan pemilihan umum langsung atas jabatan presiden di tahun 2004 dan 2014. Akan tetapi, usaha demokratisasi sejak 1998 memang sulit, berbagai perkara pelik dalam mengelola demokrasi mulai bermunculan. Seperti korupsi, ketidakpercayaan masyarakat akan aparat negara, dan tidak adanya usaha serius dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan

Dalam perspektif teori sistem Talcott Parsons, bisa diandaikan bahwa

sejumlah kegagalan negara dalam mengatasi problem demokrasi sebenarnya adalah kegagalan yang bersifat sistemik, artinya tidak ada kekompakan antara satu sistem dengan sistem yang lain untuk menjalankan tujuan bersama (*goal attainment*) negara. Kegagalan bisa terjadi karena sistem tidak memenuhi salah satu elemen AGIL dalam teori Parsons. Sementara itu, menurut teoretisi sistem Niklas Luhmann, kegagalan ini justru terletak pada sifat dasar dari sistem itu sendiri. Sifat ini yang disebut oleh Luhmann sebagai autopoiesis, sifat yang memberi kemampuan pada sistem untuk memproduksi dirinya sendiri (Suhardiyah & Siswanto, 2020), oleh karena itu Luhmann melihat sistem itu sendiri selalu dalam keadaan kacau (*chaotic*).

Secara historis sebenarnya Luhmann telah mengkritik teori Parson, yang menjadikan keseimbangan (*equilibrium*), sebagai tujuannya (Luhtinanti, 2022). Sedangkan dalam masyarakat modern, sistem menurut Luhmann dilihat memiliki menaknisme internal untuk mengatur dan membentuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya, Luhmann cenderung menganggap hubungan antara satu sistem dengan sistem-sistem yang lain selalu berada dalam kondisi *chaotic*, atau tidak seimbang, karena masing-masing sistem memiliki kehendak sendiri.

Niklas Luhmann mulanya mencetuskan konsep autopoiesis dari perbedaan dalam sistem sel-sel biologis, kemudian ia terapkan untuk menganalisis sistem-sistem lain, seperti sistem ekonomi, hukum, saintifik, birokrasi politik, hingga media massa. Tulisan ini, berusaha melihat bagaimana Luhmann memandang sistem dalam bukunya *Die Realitat der Massenmcdien* yang terbit tahun 1996, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi buku *The Reality of Mass Media*, yang terbit tahun 2000. Dalam buku ini

luhmann mengkhususkan dirinya mengkaji sistem media massa. Di dalam karya ini juga, Luhmann memandang bahwa media massa adalah tempat bercermin dan acuan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan sikapnya.

Media Massa yang Autopoiesis

Dalam buku *The Reality of Mass Media*, Luhmann menilai bahwa media massa adalah sebuah sistem dengan seperangkat rekursif, yakni semacam proses pendefinisian objek dengan diri sendiri sebagai cerminan (Luhmann, 2000). Untuk mendefinisikan dirinya sendiri, sebuah sistem membutuhkan apa yang disebut dengan kode (code). Sayangnya, menurut Luhmann kode dalam sistem media massa tidak ditentukan oleh nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, seperti disiplin verifikasi, keberpihakan pada publik, dan kebenaran, akan tetapi kode media massa diciptakan dari pemilahan oposisi biner antara yang disebut informasi dan non-informasi. Hal ini memungkinkan media untuk melakukan seleksi atas informasi dengan dasar kriteria yang dibangunnya sendiri, dan mengkomunikasikan informasi tersebut sesuai dengan refleksifitas mereka. Artinya sistem bekerja atas dasar kebutuhan mereka sendiri, dan mengembangkannya untuk merespons problem mereka sendiri (Wahyuni, 2021).

Karakter inilah yang menjustifikasi bahwa media massa adalah sistem autopoiesis. Untuk itu tulisan ini terlebih dulu akan menjelaskan ciri-ciri sistem autopoiesis menurut Niklas Luhmann. Luhmann menyebutkan empat karakteristik dalam sistem autopoiesis, sebagaimana yang disebutkan oleh George Ritzer, yaitu: *pertama* sistem autopoiesis menghasilkan elemen dasar yang membentuknya sendiri (*self-creation*); *kedua* sistem mengorganisasikan diri

dan batas-batas dari stuktur internalnya sendiri (*self-organizing*); *ketiga*, sistem menetapkan dirinya sendiri sebagai acuan dan menetapkan nilai yang relevan bagi dirinya sendiri (*self-referential*); *keempat*, sistem *autopoietic* adalah sistem tertutup, artinya sistem tidak mempunyai kaitan langsung dengan lingkungannya (Ritzer, 2015).

Empat karakteristik sistem inilah yang dijelaskan oleh Luhmann untuk memotret realitas media massa. Jika begitu, lantas bagaimana sistem media massa jika dikaitkan dengan iklim demokrasi sekarang?. Sementara ada anggapan bahwa media massa memiliki fungsi yang penting yaitu menjalankan kontrol sosial. Apakah ditengah iklim demokrasi seperti sekarang, fungsi itu telah memudar?. Tulisan ini mencoba mendiskusikan hal itu dengan mengetengahkan ciri khas sistem yang autopoiesis.

Pertama-tama Luhmann menggunakan istilah kode (*code*) untuk memberikan distingsi terhadap aspek-aspek mana yang diakui untuk masuk kedalam sistem dan aspek mana yang harus dibuang. Menurut Luhmann, kode digunakan untuk menetapkan batas dan kemungkinan dari bentuk komunikasi yang akan dilakukan oleh sistem, sehingga bentuk komunikasi tersebut bisa dilihat sebagai sebuah seleksi. Luhmann membahasakannya demikian: *kode diputuskan sebagai duplikasi buatan yang mengandung berbagai kemungkinan dengan konsekuensi bahwa setiap elemen bisa ditampilkan sebagai sebuah seleksi* (Luhmann, 2000). Dalam istilah lain, kode dapat diartikan juga sebagai "pokok pikiran" atau bahasa yang digunakan oleh sebuah sistem untuk membedakan dirinya dengan sistem yang lain.

Dalam sistem hukum misalnya, kode yang dianut adalah perbedaan antara yang legal dan yang illegal. Sementara sistem ekonomi mengikuti kode pemisahan antara yang transaksi

dan non transaksi. Kode juga dipakai untuk memberikan batas terkait jenis komunikasi seperti apa yang diizinkan dan tidak diizinkan oleh sistem, jika komunikasi tidak termasuk dalam kode yang relevan maka komunikasi itu dianggap bukan bagian dari sistem tersebut.

Lantas kode apa yang dianut oleh media massa?. Luhmann menyebut bahwa kode yang dianut oleh media massa terkait dengan pemilahan apa yang disebut informasi dan non informasi. Kode ini yang menjadikan media massa mampu menyeleksi informasi dan membuang yang non informasi serta mengkomunikasikannya sesuai dengan kriteria yang mereka bangun sendiri. Kode inilah yang kemudian menjadi dasar kerja media massa di tengah masyarakat, di mana informasi dijadikan sebagai *positive value* yang membantu media massa untuk meredusir kompleksitasnya dari lingkungan.

Dalam pengertian ini, media massa sebagai sebuah sistem dengan kodenya, telah melakukan penyederhanaan atas lingkungan yang kompleks. Luhmann berpendapat bahwa sistem memiliki kehendaknya sendiri dan berusaha untuk selalu menjadi lebih sederhana dari lingkungannya (Ritzer, 2015). Artinya, informasi dan non informasi menjadi kode atau panduan dari refleksifitas media massa untuk menghindari kompleksitas lingkungan. Lantas merujuk pada hal apakah lingkungan itu?. Dalam karya *The Reality of Mass Media*, Luhmann menyebutkan sebuah bab yang diberi judul *The Public*. Dalam bab itu Luhmann berpendapat bahwa kompleksitas lingkungan sebenarnya menyangkut hajat hidup atau kepentingan publik (Luhmann, 2000).

Luhmann berpendapat bahwa sistem akan beroperasi dengan menyederhanakan lingkungannya. Untuk itu, media massa sebagai sebuah

sistem akan mereduksi berbagai kompleksitas dari lingkungan yaitu publik, sejauh hal itu tidak mengurangi relevansinya dengan kode yang sudah ditetapkan. Sistem autopoiesis menurut pandangan Luhmann, adalah sistem yang tertutup. Maksudnya, sistem akan mengolah tangkapan representasi dari lingkungan sejauh representasi itu sesuai dengan kode mereka. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa publik menjadi lingkungan bagi media massa, akan tetapi kerumitannya akan disederhanakan sejauh hal itu relevan dengan kode media massa, yaitu informasi dan non informasi. Dari sini, bisa ditarik sebuah penafsiran bahwa publik dalam sistem autopoiesis media massa, ditempatkan dalam hubungan sejauh ia relevan dengan produk-produk informasi media massa.

Akan tetapi, pandangan Luhmann ini agaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip ideal demokrasi, di mana media massa memiliki posisi penting yakni untuk mengakomodasi dan menyuarakan kepentingan publik. Seperti keyakinan umum bahwa media massa (khususnya pers) dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam ideal ini, seharusnya media massa mampu menempatkan publik bukan sebagai sesuatu yang harus direduksi, melainkan bagaimana media massa dapat mengakomodirnya sebagai bagian dari pembentukan wacana berdemokrasi. Akan tetapi, jika kembali pada pemikiran Niklass Luhmann, media massa dengan sifat autopoiesisnya justru mereduksi publik hanya sejauh apakah itu relevan dengan kode informasi dan non informasi, atau dengan kata lain media massa berhak menentukan kelayakan informasi dan menentukannya untuk menjadi sebuah berita.

Sampai di sini bisa dipahami bahwa media massa sebagai sistem autopoiesis menciptakan kodenya

sendiri. Dalam kaitan dengan publik sebagai lingkungannya, media massa memiliki kehendak untuk membatasi diri dari kompleksitasnya sejauh hal itu relevan dengan dengan kode mereka. Artinya media massa memiliki kekuasaan untuk menyeleksi mana yang layak dan tidak layak untuk diangkat sebagai informasi dan menjadikannya sebagai berita. Akan tetapi, meskipun kode media massa disusun atas pemilahan mana yang informasi dan bukan informasi. Lantas apa kriteria kelayakan sebuah isu akan dianggap sebagai informasi dan layak diberitakan oleh media?. Di sinilah, media massa akan menyusun apa yang mereka sebut dengan kriteria *newsworthiness* (kriteria layak berita). Maka, jangan heran jika isu-isu yang diberitakan oleh media, banyak yang tidak menyentuh substansi demokrasi, seperti berita tentang kabar terbaru dari para artis. Karena memang begitulah cara media menentukan kelayakan berita (informasi), seperti diungkapkan Luhmann, mereka menyusun kode mereka sendiri.

Studi lain juga melihat krisis dalam pewacanaan demokrasi di media massa. Seperti yang diungkapkan oleh Subono, dkk (2012) bahwa demokrasi yang dimediasi-massal oleh media massa di Indonesia sangat condong ke arah tradisi demokrasi libertarian. Wacana ini mengesampingkan pentingnya oposisi dan antagonisme, sehingga persoalan terkait pemerataan kesejahteraan tidak dianggap sebagai problem sistemik. Studi ini juga menganggap bahwa telah terjadi normalisasi atas problem kesejahteraan, yang membuatnya kehilangan tempat dalam wacana demokrasi di media massa (Subono, Polimpung, & Prasajo, 2012). Kajian itu menegaskan pula bahwa demokrasi yang di mediasi oleh media massa, hanya mirip retorika belaka, dan justru menunjukkan betapa gagalnya demokrasi dalam mengupayakan pemerataan kesejahteraan.

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan publik sebagai lingkungan media massa, yang kompleksitasnya sudah direduksi sejauh berhubungan dengan kode informasi dan non informasi, maka wajar jika banyak persoalan yang luput dari perhatian media massa, padahal persoalan itu penting untuk diwacanakan. Sayangnya dalam negara demokrasi seperti Indonesia, problem kesejahteraan sebagai wacana yang sangat penting bagi publik, justru direduksi oleh media massa.

Demokrasi di Tengah Ketidakjelasan Orientasi Media Massa

Kecenderungan sistem autopoiesis media massa, membuatnya bebas menentukan kode sendiri dan mereduksi kompleksitasnya terhadap lingkungan. Dalam pandangan sosiolog Briyan S. Turner, ciri khas sistem autopoiesis dalam pemikiran Luhmann, berfungsi untuk meminimalisir resiko atau "kegaduhan" dari lingkungan (Turner, 2006). Jika begitu, maka wajar bila kemudian publik dianggap terlalu gaduh, dan perlu direduksi dengan saringan kode mereka. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa reduksi media massa atas kompleksitas lingkungannya, menunjukkan bahwa demokrasi tidak didukung secara serius oleh peranan media massa.

Dari telaah yang dilakukan oleh Subono, dkk, wacana demokrasi yang dimediasi oleh media massa, menunjukkan dominasi wacana libertarian dan posisi ini justru mengancam demokrasi karena hilangnya antagonisme dan oposisi (Subono et al., 2012). Sebab hilangnya wacana tentang antagonisme dan oposisi justru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengarah pada sebertuk otoritarianisme jenis baru. Keadaan ini justru memperlihatkan tidak adanya usaha serius yang dilakukan oleh media massa dalam memunculkan kritik, dan

beusaha menumbuhkan wacana tentang pemerataan kesejahteraan.

Dalam kenyataan demokrasi di Indonesia, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan yang belum ditangani secara serius. Namun, jika media massa terjerembab dalam tradisi libertarian di mana akses ekonomi bebas tidak lagi diperdebatkan, maka media massa pada akhirnya hanya menjadi agen yang membenarkan terjadinya ketidakadilan. Inilah yang justru berlawanan dengan tradisi demokrasi yang demokratik, di mana untuk melawan penindasan kapitalisme dalam bentuk yang semakin maju, diperlukan peran-peran antagonisme (Laclau & Mouffe, 2008). Sebab itu, sebenarnya media massa memiliki posisi penting dalam tradisi demokrasi yang demokratik, yaitu untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya kesetaraan atau *chain of equivalence* (jalinan kesetaraan), dan sikap kritis untuk mewacanakan ketidakmerataan kesejahteraan.

Akan tetapi, mengingat bahwa sistem media massa adalah sistem autopoiesis di mana konstruksi realitas dibangun dengan menyederhanakan nilai-nilai lingkungan (publik), inilah yang justru menyebabkan kekacauan dalam sistem negara demokrasi. Artinya, tidak terdapat kepaduan antara sistem media massa dengan sistem yang lain sehingga tujuan dari sistem besar demokrasi itu sendiri tidak dapat dicapai. Luhmann sendiri melihat fenomena itu sebagai semacam krisis dalam masyarakat modern, di mana media begitu dipercaya bahkan sebagai sumber referensi diri, padahal informasi yang dihasilkannya telah melalui serangkaian proses seleksi, dan konstruksi realitasnya kadang-kadang tidak memperhatikan prinsip objektivitas dan kebenaran.

Tafsir ini dapat dimengerti di tengah maraknya informasi di media massa yang cenderung ditujukan untuk memuaskan selera pasar dan hanya

bersifat sebagai hiburan. Selain itu, kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir pihak juga mengindikasikan persoalan. Ada ketakutan tersendiri di kalangan awak media jika mereka kritis terhadap pemilik media dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika media tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dua persoalan ini (ekonomi dan politik) adalah penyebab dari kacaunya orientasi media massa. Orientasi media massa yang berlebihan pada kepentingan pasar dan politik pada akhirnya akan menghadirkan resiko terbengkalainya kepentingan publik. Sikap media massa yang menunjukkan kecenderungan *never ending capital and political interest* telah menyebabkan sistem demokrasi kehilangan substansinya.

Dari pembacaan ini, terlihat bahwa Luhmann memberikan pandangan yang cerdas terhadap krisis yang dialami oleh masyarakat modern dalam mengelola sistem demokrasi. Namun, Luhmann hanya melihat dari sisi bahwa kondisi *chaotic* itu terjadi karena sistem-sistem dibiarkan bebas, tanpa kontrol, dan semuanya menetapkan kode-kode internalnya sendiri tanpa mempertimbangkan kompleksitas lingkungan eksternal. Padahal dalam berbagai literatur tentang jurnalisme disebutkan bahwa pada intinya media massa harus mampu menjaga jarak dengan pasar dan kepentingan politik.

Luhmann tampaknya telah mengabaikan aspek penting tentang bagaimana idealnya media massa membangun kodenya. Ia hanya memberikan penjelasan bahwa sistem media massa menyusun kodenya sendiri dan tidak menjelaskan bagaimana seharusnya media menetapkan batas-batas tertentu di tengah pusaran arus politik dan pasar. Padahal, pasar dan politik adalah bagian dari kompleksitas lingkungan yang menjadi dasar bagi media massa menetapkan kodenya.

KESIMPULAN DAN DISKUSI

Mewacanakan Media Publik

Niklas Luhmann telah menyajikan skema analitis untuk bagaimana memandang sistem dalam masyarakat modern. Dalam pandangannya sistem tampak mempunyai kehendak sendiri atau autopoiesis, sehingga muncullah kekacauan dalam sistem masyarakat modern. Akan tetapi, Luhmann sebetulnya juga mendapat kritikan karena analisisnya dipandang tidak membantu dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat.

Kritik terhadap Luhmann, utamanya dilayangkan oleh penerus tradisi kritis Madzab Frankfurt, Jurgen Habermas. Habermas melihat bahwa teori sosial seharusnya menyajikan sesuatu yang konstruktif untuk membantu memperbaiki kondisi masyarakat, bukan hanya memperlihatkan hal-hal yang kacau sebagai sesuatu yang tidak ada solusinya (Ritzer, 2015). Inilah yang menjadi kunci pemikiran Habermas terkait pentingnya sisi emansipasi atas teori, artinya Habermas melihat bahwa teori harus mampu menyumbang alternatif pembebasan (emansipasi) atas problem dan belenggu yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari pemikiran Niklas Luhmann, paling tidak kekacauan orientasi media massa dalam sistem demokrasi, sudah cukup dipahami. Lantas bagaimana seharusnya memperbaiki situasi itu?. Hari ini media massa adalah faktor penting yang harus dilibatkan dalam demokrasi. Tanpa media massa, demokrasi tidak akan berjalan maju dan malah justru berjalan mundur. Jika sudah diketahui bahwa masalah utamanya adalah ketidakimbangan orientasi media dalam demokrasi, di mana orientasi media terlalu condong ke arah logika ekonomi dan politik, maka yang harus diperbaiki adalah orientasinya itu sendiri.

Idealnya, dalam sistem demokrasi media massa memiliki peran yang amat penting, yaitu mengupayakan terwujudnya "*market place of ideas*". Sebuah terminologi yang bukan merujuk pada konsep ekonomi atau pasar, namun mengacu pada semacam wadah aspirasi bagi warga negara, abstraksi ini yang disebut oleh Jurgen Habermas dengan "*delinguistified steering media*". Sejalan dengan pemikiran Habermas dalam konsep *public sphere*, Richard Bustch menyebut bahwa media seharusnya menjadi ruang publik, yang berarti sebuah wilayah netral yang mengakui kesetaraan, di mana publik memiliki akses dan hak yang sama dalam partisipasinya di dalam wacana publik (Bustch, 2007). Sehingga demokrasi deliberasi (*deliberated democracy*) atau demokrasi yang dikonsultasikan secara rasional (*deliberated*) menjadi mungkin untuk terselenggara.

Meskipun, konsep ini memang masih jauh dari realita. Mengingat keadaan media massa di Indonesia yang masih diributkan dengan persoalan akumulasi kapital dan kepentingan politik, sehingga harapan untuk terakomodasinya kepentingan publik melalui media belum terlaksana dengan baik. Usaha yang mungkin relevan untuk mengupayakan demokratisasi penyiaran adalah dengan menguatkan media publik. Selama ini media swasta memang berorientasi pada penumpukan keuntungan, dan itu tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan kepemilikan media, tidak dapat dibatasi dengan regulasi. Yang paling mungkin dilakukan adalah menguatkan media publik.

Di Indonesia istilah media publik memang belum tercantum dalam regulasi, istilah yang ada dalam regulasi adalah Lembaga Penyiaran Publik, yang berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta, Komunitas, dan Berlangganan. Jika mengacu pada regulasi, UU. No. 32 tahun 2002, istilah Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum, independen, netral, dan tidak komersial, dan bertugas memberi layanan untuk kepentingan masyarakat. Regulasi ini penting karena mencerminkan semangat untuk melayani kepentingan publik. Sementara UNESCO juga sudah mengakomodir media penyiaran publik, dengan menyebutkan bahwa media penyiaran publik adalah penyiaran yang dibuat, dibiayai, dikendalikan oleh publik, dan untuk publik (Darmanto, 2020).

Akan tetapi, definisi ini juga belum mencukupi mengingat definisi tersebut hanya mencakup media penyiaran, yaitu televisi dan radio. Sementara penggunaan media sekarang mengarah pada internetisasi dan digitalisasi. Jadi, dibutuhkan definisi yang lebih luas untuk mengakomodir keragaman dalam mengakses jenis media. Selain itu, peranan publik dalam media publik juga sangat penting. Ambil contoh BBC, sebagai media informasi publik milik rakyat Inggris, di mana terdapat sistem bayar dari pelanggan, dengan begitu pelanggan dapat mengontrol informasi yang disajikan oleh BBC (Masduki, 2017). Ini menunjukkan bahwa publik atau pelanggan memiliki kontrol dan kekuatan dalam akses informasi di media publik. Sayangnya, hal ini belum terjadi di Indonesia, di mana penyiaran publik (RRI dan TVRI) masih memanfaatkan dana dari APBN yang penganggarannya penuh dengan kepentingan politik.

Jadi, apa yang bisa disimpulkan?. Bahwa dalam teori sistem Niklas Luhmann, media massa dianggap memiliki kehendak sendiri dan berhak menentukan kodenya sendiri, dengan mendefinisikan kode informasi dan non informasi. Ini menyebabkan sistem demokrasi berada dalam situasi chaotic, karena sistem-sistem yang lain dalam demokrasi juga mempunyai sifat serupa, alias tidak bisa dikendalikan. Lantas upaya apa yang harusnya dilakukan untuk mengatasi situasi yang chaotic

dalam sistem demokrasi?. Tulisan ini mengusulkan untuk mengembalikan kontrol kepada publik, salah satunya dengan memanfaatkan media publik. *Pertama*, regulasi harus mendefinisikan media publik secara lebih luas, mengingat hari ini penggunaan media sudah mengarah pada internitasasi dan digitalisasi. *Kedua*, media publik sebaiknya tidak lagi memanfaatkan dana dari APBN dan kembali pada sistem berbayar (iuran) agar publik memiliki kontrol.

Dua hal ini menjadi poin penting, mengingat media merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Tanpa media massa, demokrasi justru berjalan mundur dan akan kembali ke otoritarianisme. Upaya ini penting untuk dilakukan agar demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah tidak tergerus dengan sifat sistem-sistem yang serba autopoiesis, dan pemerintah maupun masyarakat harusnya segera mewacanakan isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bustch, R. (2007). *Media and Public Sphere* (R. Butsch, ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy* (1st ed.). Yale: Yale University Press.
- Darmanto. (2020). *Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2008). *Hegemoni dan Strategi Sosialis, Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Luhmann, N. (2000). *The Reality of the Mass Media*. Stanford: Stanford University Press.
- Luhtinanti, U. A. (2022). Mengurai Kompleksitas Masyarakat di Masa Pandemi: Labirin Menuju Pendekatan Sistemik Perspektif Sistem Sosial Luhmann. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 294-309. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v>

11i2.44440

Masduki. (2017). *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Ritzer, G. (2015). *Teori Sosiologi Modern* (7th ed.). Jakarta: Kencana.

Subono, N. I., Polimpung, H. Y., & Prasajo. (2012). *Oposisi Demokratik, Di Era Mediasi-Massal Demokrasi*. Jakarta: UI Press.

Suhardiyah, M., & Siswanto, A. H. (2020). KOMUNIKASI NIKLAS LUHMANN DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI WILAYAH PERKOTAAN. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 23-39. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.811>

Suseno, F. M. (2008). *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Impulse.

Syahputra, I. (2013). *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*. Jakarta: Gramedia.

Turner, B. S. (2006). *Runtuhnya Universalisme Sosiologi Barat*. Yogyakarta: Arruz Media.

Wahyuni, H. I. (2021). *KOMUNIKASI AUTOPOIESIS SEBAGAI ENERGI ADAPTASI SISTEM SOSIAL: RESPON, RESONANSI, (R)EVOLUSI*. Retrieved from <https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2021/11/Pidato-GB-Prof.-Hermin-Indah-Wahyuni-09-Nov-2021.pdf>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan Ke V). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.